

MUHAMMADIYAH DAN POLITIK DAKWAH

Sudarno Shobron

Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: ss75@ums.ac.id/sudarnoshobron@gmail.com

ABSTRACT

Muhammadiyah as a missionary movement of amar ma'ruf nahi munkar has similarities and differences with other Islamic movements which are equally as a missionary movement. The equation is like to build Indonesia in accordance with the teachings of Islam in all aspects of life. The difference lies in the strategy of preaching, there are through structural which came to power and there are cultural that are to create an Islamic society. Muhammadiyah political da'wah depicted in its efforts to make improvements in people's lives, both in the field of religious understanding, economic, social, cultural, educational and defense and security, with the target individual or institutional, economic, political, state, social and cultural sectors.

Keywords: Muhammadiyah, The Islamic Movement, Political Da'wah.

كانت المحمدية إحدى الجمعيات الإسلامية التي تأمر بالمعروف وتنهى
ن المنكر – وهناك مساواة وفروق بينها وبين الجمعيات الأخرى –
كالجمعيات الأخرى فإن الجمعية المحمدية تزعم ان تبني بلاد اندونيسيا
طبقا بالشريعة الإسلامية في سائر نواحي الحياة اليومية واختلفت طريقة
دعوتها. ومن الجمعيات أدت الدعوة بواسطة وظيفية، ومنها بالحضارة،
وبإنشاء المجتمع الإسلامي وظهرت طريقة الدعوة المحمدية بإصلاح
حيات المجتمع في فهم تعاليم إسلامية، والاجتماعية والتربوية ومحافظة
أمن البلاد فردية كانت ام مؤسسية والاقتصاد، والسياسة، والبلاد، والا
جتماعية والحضارة.

كلمات البحث: المحمدية، الحركة الإسلامية، سياسة الدعوة.

PENDAHULUAN

Al-Harakah al-Islamiyah begitu istilah yang populer di kalangan orang-orang pergerakan untuk menyebut gerakan Islam, suatu gerakan yang ingin mewujudkan ajaran Islam secara utuh, melaksanakan syariat Islam secara total, baik dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah dunyawiyah, maupun bidang hukum, didalamnya termasuk pidana dan perdata. Ada dua pandangan tentang cakupan syari'at Islam, satu sisi syari'at Islam adalah semua ajaran Islam, namun sisi yang lain syari'at Islam adalah hukum Islam itu sendiri, yang dipersempit hanya hukum pidana. Sewajarnya kalau ada yang menilai bahwa Indonesia ini adalah negara sekuler, bahkan negara kafir,¹ karena *hudûd*, *qishâsh* belum dilaksanakan dan sistem politiknya menerapkan sistem Barat, yakni demokrasi, dan sistem ekonominya menerapkan prinsip-prinsip kapitalisme. Akan tetapi Indonesia masuk dalam kelompok negara Muslim, karena jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam, terbesar di dunia, sehingga tidak tepat dikatakan negara sekuler atau kafir.² Kalau negara sekuler, akan ada pemisahan antara urusan

negara dan urusan agama, padahal hal ini tidak terlihat dalam praktek kenegaraan di Indonesia. Negara juga ikut mengurus masalah-masalah agama, dengan bukti untuk menentukan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah, negara yang menentukan, walaupun kadang berbeda dengan organisasi lain. Bukti lain, negara mengeluarkan Undang-Undang yang hanya diperuntukkan umat Islam, misalnya Undang-Undang Perkawinan, Peradilan Agama, Zakat, Haji, dan Perbankan Islam, sedangkan pemeluk agama lain tidak memiliki Undang-Undang serupa yang disahkan negara. Negara memiliki kepentingan untuk mengakomodasi dari mayoritas umat Islam. Kepentingan dalam rangka untuk menjaga stabilitas nasional, dan memberikan perlindungan kepada pemeluk agama dalam mengamalkan ajaran agamanya. Agar dalam mengamalkan ajaran agama itu berjalan dengan rapi dan teratur, maka negara ikut terlibat di dalamnya.

Umat Islam Indonesia yang jumlahnya mayoritas tidaklah dalam satu wajah, melainkan banyak wajah (*multi face-dzuu wujuh*), karena dilihat dari perspektif teologis sebagian besar menganut ahlussunnah wal jamaah, dari perspektif fiqh sebagian

¹ Lihat Abdullah Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, terj: Sri Murniati, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007).

² Farid Wajdi & Shiddiq al-Jawi et.al., *Ilusi Negara Demokrasi*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009). Bandingkan dengan Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).

besar menganut madzhab Syafiiyah, dilihat dari perspektif tasawuf menganut tasawuf al-Ghazali. Perspektif ini mengajarkan umat Islam untuk memiliki sikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan, sehingga di Indonesia juga hidup subur aliran-aliran tasawuf dalam bentuk thariqah-thariqah, baik yang *mu'tabarah* maupun yang *ghairu mu'tabarah*. Semua ini menandakan bahwa Islam di Indonesia itu multiperspektif, beragam corak, tidak tunggal. Karena itulah berbagai gerakan Islam yang memiliki corak teologi, fikih, tasawuf, dan politik yang berbeda-beda dapat hidup subur dan berdampingan secara rukun. Walaupun dalam sejarah Islam Indonesia pernah terjadi konflik dikalangan sufi, sehingga menghalalkan darahnya sebagaimana awal masuknya Islam di Indonesia pada periode kedua. Konflik antar organisasi Islam karena perbedaan teologi atau doktrin keagamaan yang dianut, akan tetapi konflik tersebut tidak merusak sendi-sendi ukhuwah Islamiyah.

Apalagi dirunut ke belakang sejak masa penjajahan, orde lama, orde baru maupun pada masa reformasi, gerakan Islam jumlahnya terus saja bertambah. Menjamurnya gerakan Islam di Indonesia dapat dikemukakan beberapa alasan:

1. Mayoritas penduduknya beragama Islam yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi, karena memang watak Islam itu sendiri yang toleran terhadap

perbedaan. Jarang dijumpai konflik antar pemeluk agama di Indonesia. Kasus-kasus konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor non-agama, misalnya faktor sosial, ekonomi, keangkuhan ras, kesombongan etnis, kemudian dihubungkan dengan agama yang terlihat dalam konflik. Apalagi kalau menengok Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang memberikan kewenangan kepada FKUB untuk menyelesaikan problem-problem keagamaan yang terjadi di daerah, sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi konflik.

2. Budaya Indonesia itu sendiri menekankan pada kesantunan, keramahan, dan kerendahan hati, sehingga kehadiran organisasi baru tidak melahirkan resistensi yang berarti. Budaya yang dikembangkan adalah budaya "grenengan" (berbisik-bisik), dan banyak yang berhenti pada "grenengan" itu sendiri, sehingga tidak muncul dalam tindakan nyata penolakan. Kasus Ahmadiyah, Qur'an Suci, al-Qiyadah al-Islamiyah,

Satrio Pininget misalnya, karena perbedaan teologis dengan mainstream akidah umat Islam. Seandainya tidak ada perbedaan teologis yang mencolok, beberapa gerakan Islam yang muncul tersebut tidak akan dipersoalkan oleh umat Islam dan organisasi massa Islam yang lain. Hanya saja perbedaan teologis ini mengarah pada konflik horizontal, dan melakukan perusakan tempat tinggal anggota dan masjid-masjid milik Ahmadiyah oleh umat Islam yang berbeda tersebut. Bahkan di Nusa Tenggara Barat akan dilakukan relokasi oleh pemerintah setempat, karena kehadiran Ahmadiyah meresahkan umat Islam setempat. Pola dan cara penyelesaian itu sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena Islam mengajarkan dialog dengan baik, berkata yang sopan. Islam menebarkan kedamaian, keteguhan, kesejukan dan toleransi, bukan dengan menebarkan kekerasan, perusakan yang merugikan diri umat Islam itu sendiri.

3. Semangat Hak Asasi Manusia dalam hal beragama, berserikat dan berpendapat yang secara esensial telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ti-

dak ada larangan untuk mendirikan organisasi keagamaan, karena telah ada jaminan hukum, kecuali kalau organisasi itu bertentangan dengan empat pilar Republik Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka dilarang berdiri. Namun selagi tidak mempersoalkan empat pilar tersebut, gerakan Islam akan aman-aman saja, walaupun mempersoalkannya pada era reformasi ini tidak dapat ditindak kalau belum melakukan aksi pemberontakan.

Semua gerakan Islam yang berdiri dan berkembang di Indonesia, kalau dilihat dari orientasi gerakannya sangat beragam sesuai dengan corak pemikiran para pendiri atau penggerakannya dalam memahami ajaran Islam, sehingga dapat dipilah menjadi tiga orientasi gerakan, yakni:³

1. Orientasi murni dakwah amar makruf nahi munkar. Hal ini mengandung maksud bahwa orientasi gerakan hanya pada dakwah saja, tidak masuk ke wilayah politik praktis. Orientasi gerakan dakwah membangun masyarakat ke arah yang lebih baik dengan melalui perbaikan, perubahan, dan melakukan transformasi sesuai kondisi

³ Sudarno Shobron, Model Dakwah Hizbut Tahrir, dalam *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No.1 Juni 2014, (Surakarta: Pascasarjana UMS, 2014), hlm. 49-50.

obyektif masyarakat yang menerima dakwah. Kondisi kemiskinan harta benda, ilmu, etika dan kemiskinan orientasi masa depan, dari waktu ke waktu tidak berkurang melainkan terus bertambah.

Walaupun banyak gerakan gerakan Islam yang berorientasi dakwah, namun tidak memiliki kesamaan dalam strategi dan metode berdakwah. Sebagian menggunakan metode keke- rasan, sebagian yang lain menggunakan cara yang lemah lembut, berpindah dari rumah ke rumah, dengan cara yang bijaksana, memberikan nasehat yang baik dan melakukan dialog keagamaan. Beberapa gerakan Islam yang masuk dalam kelompok ini adalah Muhammadiyah, Al-Iryad, Persis, Jama'ah Tabligh, Ahmadiyah, Dewan Dahwah Islamiyah Indonesia (DDII), Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Front Pembela Islam (FPI). Muhammadiyah didirikan oleh K.H.Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 di Yogyakarta, yang memiliki identitas sebagai gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar dan gerakan tajdid, bersumber pada

Alquran dan Asunnah. Maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.⁴ Al-Irsyad Al-Islamiyyah (*Jam'iyat al-Islah wal Irsyad al-Islamiyyah*) berdiri pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H). Pendiri Al-Irsyad adalah Syeikh Ahmad Surkati Al-Anshori, ulama besar Mekkah yang berasal dari Sudan. Al-Irsyad memiliki sifat khusus, yaitu berakidah Islamiyyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pendidikan, pengajaran, sosial dan dakwah. Lembaga pendidikannya ditekankan pada pendidikan tauhid, fikih, dan sejarah, dan Al-Isyad telah melahirkan tokoh besar, yakni K.H. **Yunus Anis**, **Prof. Dr. T.M. Hasby As-Shiddique**, **Prof. Kahar Muzakkir**, **Prof. Dr. Muhammad Rasjidi**, **Prof. Farid Ma'ruf**, **Prof. Umar Hubeis**, **Prof. Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani**, **AR. Baswedan**, pendiri Partai Arab Indonesia (PAI) dan aktifis Masyumi ini pernah menjadi Wakil Menteri Penerangan RI.⁵ Persis pada tanggal 23 September 1923 di Bandung oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad

⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar Muhammadiyah* pasal 2, 4 dan 6.

⁵ [www:http//alirsyad.org](http://alirsyad.org). Untuk mengetahui lebih lanjut tentang AR Baswedan, lihat Sudarno Shobron, *Pemikiran AR Baswedan tentang Integrasi Arab Indonesia*, (Surakarta: FAI UMS, 1990).

Yunus. Nama Persatuan Islam mempunyai pengertian sebagai “Persatuan Pemikiran Islam, Persatuan Rasa Islam, Persatuan Usaha Islam, dan Persatuan Suara Islam”. Penamaan ini diilhami oleh Q.S. Ali Imran/3: 103 dan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi yakni *يد الله مع الجماعة*. Persis didirikan dengan tujuan 1) mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat; dan 2) menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syariah berdasarkan Alquran dan Alsunah.⁶

Jama'ah Tabligh didirikan pada akhir dekade 1920-an oleh Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi di Mewat, India. Tujuannya membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Ciri yang mudah dikenali adalah melakukan *khuruj* atau ke luar dari rumah untuk melakukan dakwah dalam waktu tertentu, dengan biaya transportasi dan akomodasi ditanggung sendiri oleh anggotanya. *Khuruj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya

dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang Amir. Orang yang *khuruj* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin *Amir khuruj*. Tapi para karyawan diperbolehkan tetap bekerja, dan langsung mengikuti kegiatan sepulang kerja. Pusat Markas Internasional Jama'ah Tabligh ada di Nizamudin, India, untuk memudahkan koordinasi dibentuklah markas-markas regional/daerah yang dipimpin oleh seorang *Shura*. Kemudian dibagi lagi menjadi ratusan markas kecil yang disebut *Halaqah*. Kegiatan di Halaqah adalah musyawarah mingguan, dan sebulan sekali mereka *khuruj* selama tiga hari. Kegiatan dalam *khuruj* adalah *ta'lim* (membaca hadits atau kisah sahabat, biasanya dari kitab *Fadhail Amal* karya Maulana Zakaria), *jaulah* (mengunjungi rumah-rumah di sekitar masjid tempat *khuruj* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang kaffah), *bayan*, *mudzakarah* (menghafal) 6 sifat sahabat, *karkuzari* (memberi laporan harian pada amir), dan *musyawarah*. Selama masa *khuruj*, mereka tidur di

⁶ Dudung Abdurrahman, *Persatuan Islam Gerakan dan Pemikirannya di Indonesia 1923-1958*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1988), hlm. 36. *Tafsir Qanun Asasi dan Qanun Dakhil Persatuan Islam*, (Bandung: PP Persatuan Islam, 1984), hlm. 17-21. Badri Khaeruman, *Islam Ideologis Perspektif Pemikiran dan Peran Pembaharuan Persis*, (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), hlm. 61-70. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 95-113.

masjid.⁷ Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad ini pecah menjadi dua, yakni Ahmadiyah Qodiani yang berpusat di Qodian, India, berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, dan Ahmadiyah Lahore yang berpusat di Lahore, Pakistan, berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, melainkan seorang mujaddid saja. Perbedaan teologis inilah sebagai titik problem keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, karena jauh dari mainstream ajaran Islam, sehingga sering dianggap sebagai aliran sesat. Ahmadiyah Lahore masuk ke Indonesia pada tahun 1924 dibawa oleh Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad ke Jogjakarta, sedangkan Ahmadiyah Qodiani datang pada tahun 1925 dibawah oleh da'i Ahmadiyah yang bernama Rahmat Ali ke Aceh, kemudian ke Padang dan ke Jakarta.⁸ DDII didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 1967 oleh ulama-ulama mantan aktivis Masyumi dan pejabat negara, misalnya M.Natsir, H.M.Rasyidi,

K.H. Taufiqurrahman dan Nawawi Duski. Organisasi ini memiliki tujuan mendorong, memperbaiki, dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia dengan dasar takwa dan keridhaan Allah. Amal usahanya berupa lembaga pendidikan, percetakan, penerbitan, dan toko buku. Selain itu, DDI juga menjalin kerjasama dengan organisasi Islam Internasional, misalnya Rabithah al-'Alam al-Islamy yang berpusat di Mekah, Mukhtar Alam Islam yang berpusat di Karachi, dan Dewan Masjid Sedunia yang berpusat juga di Mekah.⁹

Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) didirikan oleh Ustadz Abdullah Thufail Saputra di Surakarta pada tanggal 19 September 1972 dengan tujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke Alquran. Tujuan ini disusun berdasarkan kenyataan kondisi obyektif umat Islam pada akhir dekade 60 dan awal dekade 70 yang selalu terpinggirkan dari bidang ekonomi, sosial dan politik, padahal umat

⁷ Lihat, http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh.

⁸ A.Yogaswara dan Maulana Ahmad Jalidu, *Aliran Sesat dan Nabi Palsu*, (Yogyakarta: Narasi, 2008). Buku dijelaskan aliran sesat yang ada di Indonesia, yakni al-Qiyadah al-Islamiyah, Salamullah (Lia Eden), Alquran Suci, Ahmadiyah, LDII, Bahaisme, Darul Arqam, NII—Ma'had al-Zaytun, Inkarussunah, dan beberapa sekte tradisional lainnya. Lihat juga Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

⁹ Kafrawi Ridwan dkk (ed.), *Ensiklopedi Islam I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hlm.308-309.

Islam yang berjuang untuk meraih kemerdekaan. MTA memiliki bidang garap dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan penerbitan. Juga menerbitkan Brosur Jihad Pagi, dan awal tahun 2007 telah mengudara Radio MTA FM pada frekwensi 107,9 MHz.¹⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta dari hasil konggres yang dihadiri dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, sepuluh orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Khittah 1) pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*); 2) pemberi fatwa (*mufti*); 3) pembimbing dan pelayan umat (*riwayat wa khadim al ummah*); 4) gerakan islah wa al-Tajdid; dan 5) Oenegak amar ma'ruf dan nahi munkar.¹¹

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), sebelumnya

bernama Darul Hadis, kemudian Islam Jama'ah, ganti nama lagi menjadi Lemkari, dan terakhir LDII. Darul Hadis didirikan pada tahun 1952 di Pondok Pesantren Burengan Kediri, oleh Ustad Nurhasan Ubaidah Lubis, dengan nama kecil al-Madkhal (Madekal, Madigol) kemudian pada tahun 1963 berubah menjadi Islam Jama'ah setelah pondok Burengan diserahkan kepemimpinannya kepada Drs. Nurhasyim (alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta—sekarang UIN). Pada tahun 1971 Jaksa Agung RI melarang Islam Jama'ah karena dianggap sebagai aliran sesat. Setelah dilarang bukan kemudian mati kegiatannya, berdasarkan arahan dari Pangdam VIII Brawijaya, Islam Jama'ah berganti nama menjadi Lemkari (Lembaga Karyawan Islam Indonesia) pada tahun 1971. Di tingkat pusat namanya Lemkari, tapi di daerah menggunakan nama lain, misalnya di Jawa Tengah, mantan anggota Islam Jama'ah diwadahi dalam Yayasan Karyawan Indonesia (Yakari), di Jawa Barat menggunakan nama Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LKDI), di Jakarta dengan nama Karyawan Dakwah Islam (Kadim). Karena

¹⁰ <http://mta-online.com/v2/sekilas-profil/>

¹¹ <http://www.mui.or.id>

di daerah-daerah menggunakan nama yang berbeda, maka berdasarkan arahan Amir Murtono, Ketua Umum DPP Golkar, disepakatilah nama LEMKARI. Nama ini ternyata memiliki kesamaan singkatan dengan Lembaga Karatedo Indonesia, maka pada tahun 1990 atas dasar arahan Rudini selaku Menteri Dalam Negeri dan Sudharmono selaku wakil presiden, keduanya tokoh Golkar, dirubahlah namanya menjadi LDII. Perubahan nama ini menjadikan LDII berkembang pesat hingga ke luar negeri, maka dibentuklah perwakilan LDII di Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, Amerika Serikat, Australia dan Eropa. Sejak tahun 2005 LDII mengeluarkan konsep paradigma baru (*new paradigm*),¹² bahwa LDII tidak berafiliasi dengan golongan ataupun partai politik manapun, dan berpaham salafi, namun secara fundamental memiliki konsep keagamaan tentang kejama'ahan dan keimamahan.¹³ Kejama'ahan dan keimamahan yang didasarkan pada atsar Umar R.A.:

لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ولا طاعة إلا ببيعة

"Tidak ada Islam tanpa jama'ah, dan tidak ada jama'ah tanpa imarah, dan tidak ada imarah tanpa ketaatan, dan tidak ada ketaatan tanpa bai'at".

Beberapa doktrin LDII 1) *Manqul*; 2) *imamah* dan *bai'at* (didasarkan pada Q.S. al-Isra'/ 17: 71); *taqiyah*: *fathonah* dan *bithonah*.

Gerakan Islam terakhir yang bergerak dalam bidang dakwah murni adalah Front Pembela Islam (FPI) didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1998. Secara teologis FPI menganut teologi Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, dengan rumusan teologi, bahwa: 1) Allah adalah Tuhan tujuan kami; 2) Muhammad Rasulullah adalah teladan kami; 3) Alquran adalah imam kami; 4) jihad adalah jalan kami; dan 5) mati syahid adalah cita-cita kami. Doktrin yang dijadikan pegangan bagi anggotanya, yaitu: 1) meneguhkan niat dan keikhlasan demi Allah, menjadi pejuang sejati yang selalu bersemangat dalam perjuangan dimana dan

¹² Habib Setiawan et.al., *After New Paradigm: Catatan Para Ulama tentang LDII--Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Islam Madani Institute, 2008).

¹³ *Ibid.*, Lihat juga Hartono Ahmad Jaiz (ed.), *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII*, (Jakarta: LPPI, 1998).

kapan saja; 2) memulai dari diri sendiri; 3) kebenaran harus ditegakkan; 4) setiap orang pasti akan mati; dan 5) menjadi mujahid atas para musuhnya.¹⁴

2. Orientasi murni politik. Hal ini memiliki maksud bahwa gerakan yang khusus mengambil jalur struktural, melalui politik kekuasaan, dengan mendirikan partai politik yang memiliki cirri khusus Islam. Gerakan ini beranggapan bahwa dengan politiklah Islam dapat ditegakkan, karena kalau telah berkuasa dalam suatu negara akan dengan mudah merubah tatanan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam. Konsep *din wa al-daulah* (agama dan negara) menjadi satu kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun hampir semua gerakan Islam di dunia yang berorientasi politik kemudian disebut gerakan politik Islam, tidak selalu menang dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum (pemilu). Gerakan Poilitik Islam di beberapa negara, misalnya di negara-negara Asia Tenggara (Thailand, Philipina, Vietnam,

Malaysia, dan Burma) tidak pernah memegang kekuasaan. Ini suatu problem serius bagi gerakan politik Islam, walaupun jumlah umat Islam tergolong besar, sehingga tidak ada hubungan signifikan antara jumlah umat Islam dengan perolehan suara partai politik Islam.¹⁵ Gerakan Islam yang masuk dalam kelompok ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT).

HTI merupakan bagian dari Hizbut Tahrir Internasional yang didirikan di Quds Palestina pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin an-Nabhani. HT masuk ke Indonesia pada tahun 1983 dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang aktivis HT dari Australia yang berasal dari Yordania. Pemikiran HT semula dikenalkan di Pondok Pesantren al-Ghazali Bogor, kemudian di masjid al-Ghifari IPB dan terus berkembang ke kampus-kampus besar di Indonesia seperti Unpad, UI, ITB, Unhas dan Unair.

HT adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam, yang dasar pendiriannya sebagai

¹⁴ Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI (Front Pembela Islam) Mengungkap Rahasia-rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*, (Jakarta: Nun Publisher, 2008), hlm. 88-101.¹⁰ <http://mta-online.com/v2/sekilas-profil/>

¹⁵ Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, terj: Harimurti dan Qamaruddin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, [t.th.]).